**Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan**

Article Number: 208 | Rating: 5/5 from 1 votes | Last Updated: Wed, May 4, 2016 at 1:22 AM

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peratura Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres tersebut terdapat beberapa perubahan-perubahan penting yaitu : Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja PenerimaÂ UpahÂ (PPU) ya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD, dan Pe Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan, dan dibayar dengan ketentuan sebagai 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta. Untuk proporsi iuran untuk p Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha Swasta adalah tetap sama dengan yang sebelumnya, yaitu 4% (emp persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta. Penyesuaian Hak Kelas Perawatan PPU : Ruang Perawatan kelas II : Peserta PPU dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan gaji atau u sampai dengan Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah). Ruang Perawatan kelas I : Peserta PPU dan Pegawai Pemer Non Pegawai Negeri dengan gaji atau upah di atas Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sampai dengan Rp 8.000.0 (Delapan Juta Rupiah) Iuran Jaminan Kesehatan Peserta PBIÂ Jaminan KesehatanÂ serta penduduk yang didafta oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 23.000,- per orang per bulan Iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Pen Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja, untuk : kelas IIIÂ menjadiÂ Rp 30.000,- kelas II menjadi Rp 51.000,- d kelas I menjadiÂ Rp 80.000,-.

Berikut Perbandingan Perpres No. 12 dan 111 Tahun 2013 dengan Perpres No. 19 Tahun 2016 :

Â

| ITEM | PERPRES No.12 & 111 / 2013 (Lama) | PERPRES No.19 / 2016 (BARU) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| IURAN PBI | 19.225 | 23.000 | Berlaku 1 Januari 2 |
| IURAN PBPU (Mandiri) | | | |
| KELAS 1 | 59.500 | 80.000 | |
| PROPORSI IURAN PPU | | | |
| PNS / TNI / POLRI / PPNPNS | 2% Pekerja<br>3% Pemberi Kerja | | TETAP |
| PPU Swasta (Perusahaan) | 1% Pekerja<br>4% Pemberi Kerja | | TETAP |
| KLASIFIKASI KELAS RAWAT INAP PPU | | | |
| PNS / TNI / POLRI | Kelas 1 : Setara Golongan III dan IV<br>Kelas 2 : Setara Golongan I dan II | | TETAP |
| PPU Swasta / PPNPNS | Kelas 1 : Gaji / Upah 1,5 s.d. 2x PTKP K1<br>Gaji / Upah 3.543.750 s.d. 4.725.000 | Kelas 1 : Gaji / Upah 1,5 s.d. 2x PTKP K1<br>Gaji / Upah > 4.000.000 s.d. 8.000.000 | BERUBAH |
| | Kelas 2 : Gaji / Upah UMK s.d. 1,5 PTKP K 1<br>Gaji / Upah UMK s.d. 3.543.750 | Kelas 2 : Gaji / Upah UMK s.d. 1,5 PTKP K 1<br>Gaji / Upah UMK s.d. 4.000.000 | |
| BATAS GAJI MINIMUM DAN MAKSIMUM | | | |
| PPU Swasta (Perusahaan) / PPNPNS | Batas Upah Minimum yaitu UMK Tahun 2016.<br>Contoh daerah Jakarta : 3.100.000,- (Iuran Rp 155.000) | | TETAP |
| | Batas Gaji Maksimum adalah Rp 4.725.000 (Iuran Rp 236.250) | Batas Gaji Maksimum sebesar Rp 8.000.000 (Iuran Rp 400.000) | BERUBAH |

Posted by: lia - Tue, May 3, 2016 at 11:08 PM. This article has been viewed 7625 times.

Online URL:

https://www.krishand.com/support/article/peraturan-presiden-no-19-tahun-2016-penyesuaian-iuran-bpjs-kesehatan-2


PDF Generated by PHPKB Knowledge Base Script